

STRATEGI MEDIA INTERNASIONAL CHINA DALAM MENYIKAPI MEDIA PROPAGANDA BARAT MENGENAI ETNIS UIGHUR DI XINJIANG

Maria Krista Elen Klaran Tahu^{1*}

¹Program Studi Magister Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga, Jawa Timur
Email: maria.krista.elen-2022@fisip.unair.ac.id

*Korespondensi: maria.krista.elen-2022@fisip.unair.ac.id

(Submission 21-08-2023, Revisions 28-11-2023, Accepted 04-12-2023)

Abstract

The counter-terrorism policy by establishing Internment Camps in Xinjiang has generated various contradictions. This policy is considered to have had the impact of gross human rights violations on the people of Xinjiang, especially the Uyghur Muslim ethnicity. The Western media has carried out demonization propaganda that China's policies have discriminated against the Uighur ethnicity. The Internment Camp are said to be prison for the Uighur ethnic group by limiting their freedom. Responding to information spread by extreme Western media, China has carried out a disinformation campaign through its international media, where the disinformation campaign is a strategic step for China to convey the different fact that there is no act of discrimination against any ethnicity in Xinjiang. The disinformation campaign by the Chinese media succeeded in dismissing all bad news about their country by presenting different facts by showing evidence that the Uighur ethnic group lives peacefully in Xinjiang. Chinese media has firmly stated that the internment camps are not intended for ethnic Uighurs but rather individuals who fulfil three categories under the Anti-terrorism Law. The policy made is the Chinese government's way of eradicating terrorism in his country. Additionally it is stated that the Internment Camp was established to provide vocational training according to his national regulations. This study uses qualitative research methods with a descriptive analytical type of research. This research is based on the agenda setting theory in the mass media which is used to help analyze the problems in this study.

Keywords: China, counterterrorism, media, propaganda, Uyghur.

Abstrak

Kebijakan kontra terorisme dengan mendirikan Kamp Interniran di Xinjiang menimbulkan beragam kontroversi. Kebijakan tersebut dinilai sebagai tindakan pelanggaran HAM berat terhadap masyarakat Xinjiang khususnya etnis muslim Uighur. Media Barat melakukan propaganda demonisasi bahwa kebijakan China telah mendiskriminasikan etnis Uighur. Kamp Interniran disebut sebagai penjara bagi etnis Uighur dengan membatasi kebebasan etnis Uighur. Menyikapi informasi yang disebar oleh media ekstrim Barat, maka China melakukan kampanye disinformasi melalui media internasionalnya, dimana kampanye disinformasi merupakan sebuah langkah strategis China untuk menyampaikan fakta yang berbeda bahwa tidak ada tindakan diskriminasi terhadap etnis manapun di Xinjiang. Kampanye disinformasi oleh media China berhasil menepis segala pemberitaan buruk mengenai negaranya dengan menampilkan fakta yang berbeda dengan menunjukkan bukti bahwa etnis Uighur hidup dengan damai di Xinjiang. media China secara tegas menyatakan bahwa Kamp Interniran tidak diperuntukan bagi etnis Uighur melainkan individu yang memenuhi tiga kategori berdasarkan UU antiterorisme. Kebijakan yang dibuat merupakan cara pemerintah China untuk memberantas terorisme di negaranya. Selain itu dinyatakan bahwa Kamp Interniran didirikan untuk memberikan pelatihan kejuruan sesuai dengan peraturan nasional China. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian berupa deskriptif analitis. Penelitian ini berlandaskan teori agenda setting dalam media massa yang digunakan untuk membantu menganalisis masalah dalam penelitian ini.

Kata Kunci: China, kontra terorisme, media, propaganda, Uighur

PENDAHULUAN

Dalam dunia yang serba cepat dan sangat kompetitif, media menjadi alat yang sangat penting dalam menjangkau target di seluruh bidang baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya. Penelitian ini

ditujukan untuk mengetahui peran media dalam bidang politik, dimana media memfasilitasi produksi, penyebaran maupun pertukaran konten politik di berbagai platform media yang dapat menimbulkan reaksi, interaksi dan kolaborasi dari publik. Peran media yang sangat heterogen dapat menimbulkan implikasi luas pada praktik perpolitikan negara, termasuk media bisa menjadi jembatan komunikasi antara pemimpin negara, baik dalam perspektif yang positif maupun negatif. Media massa yang dikategorikan sebagai media modern dapat menyajikan beragam berita yang penuh dengan ambiguitas, menyisihkan sedikit fakta sehingga menimbulkan karakteristik yang beragam pula dari para pengguna media, sehingga tanpa disadari bahwa dunia memasuki era “*post truth*” (Keyes, 2004).

Situasi seperti ini sering ditemukan pada dunia perpolitikan dimana media digunakan sebagai senjata bermata dua untuk para politisi, eksekutif perusahaan, maupun pialang kekuasaan lainnya. Hal tersebut terjadi karena informasi yang disebar oleh media dapat membentuk opini publik sekaligus meraih dukungan publik dan tentu saja mengarah pada tindakan propaganda, yang secara sederhana diartikan sebagai suatu usaha atau tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terencana serta berulang-ulang dalam menyebarkan pesan dengan tujuan agar dapat mempengaruhi pandangan, sikap maupun tindakan dari masyarakat umum untuk melaksanakan kegiatan tertentu (Bachtiar *et al.*, 2016).

Media memainkan peran penting dalam masyarakat yang demokratis, dimana media dapat menyediakan layanan informasi yang dibutuhkan dan tidak terbatas kepada publik. Media bisa memberikan forum untuk mengeluarkan pendapat dan pandangan tentang berbagai isu politik dari berbagai belahan dunia. Secara eksplisit, dapat dikatakan bahwa media saat ini berusaha melibatkan publik secara langsung dalam berbagai aktivitas politik, seperti memilih, mengkritik, pengambilan keputusan hingga mengambil bagian dalam gerakan protes pada kebijakan politik yang dianggap menyimpang (Dijk, 2009). Hal ini juga berlaku pada isu diskriminasi etnis Uighur di Xinjiang China, dimana pada tahun 2017, media massa digemparkan oleh isu diskriminasi etnis Uighur yang dilakukan oleh pemerintah China. Isu diskriminasi tersebut berhasil mendapatkan perhatian masyarakat internasional dan hal ini mengakibatkan negara yang dijuluki “Negeri Tirai Bambu” ini mendapatkan banyak kecaman yang datang dari berbagai kalangan internasional baik itu negara, organisasi internasional hingga NGO maupun INGO.

Berita yang beredar di berbagai sosial media, menyebarkan adanya isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap salah satu etnis minoritas yang beragama Islam di Xinjiang. Munculnya isu ini, berawal dari kebijakan kontra terorisme pemerintah China untuk mendirikan Kamp Interniran Xinjiang atau yang dikenal dengan pusat pendidikan kejuruan. Kamp Interniran didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelatihan ketenagakerjaan sekaligus untuk memerangi ekstrimisme teroris melalui teori hukum China, keahlian kerja dan juga pelatihan bahasa Mandarin (Maizland, 2022).



Gambar 1. Peta Letak Geografis Xinjiang (Thomas Lum & Weber, 2022).

Etnis Uighur adalah kelompok etnis minoritas Muslim yang tinggal di daerah otonomi Uighur Xinjiang atau dikenal dengan sebutan XUAR, yang terletak di ujung Barat Laut Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan lokasi yang berbatasan langsung dengan delapan negara, yaitu: Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India (Lihat Gambar 1). Xinjiang merupakan lokasi yang strategis, yang oleh pemerintah China disebut sebagai “*core hub*”. Wilayah tersebut terkenal sebagai *Jalan Sutra*, yaitu tempat yang menghubungkan Tiongkok Kuno dengan seluruh dunia dengan cadangan minyak dan wilayah penghasil 80% kapas, serta tempat dimana beragam budaya berkumpul (Mongol, sarikol, Kazakh, Hui, Tatar dan masih banyak lainnya). Berdasarkan sejarahnya, etnis Uighur merupakan etnis keturunan Turki yang kemudian melalui proses migrasi dan integrasi yang panjang, pada 1949 dianeksasi oleh China sehingga berganti nama menjadi daerah otonomi Uighur Xinjiang (Thomas Lum & Weber, 2022).

Karena lokasinya yang strategis, maka pemerintah China menerapkan beberapa aturan yang bertujuan untuk mencegah berbagai ancaman kejahatan yang dinilai dapat mengganggu keamanan wilayah tersebut serta meminimalisir kejahatan seperti kelompok separatis, ekstremis agama maupun terorisme. China memang memiliki masalah terkait dengan serangan terorisme dengan kasus tertinggi pada 7 Maret 1997 dimana terjadi pengeboman bus di wilayah Xidan Beijing. Kemudian kejadian ledakan bom mobil pada 28 Oktober 2013 tepatnya di Lapangan Tianamen Beijing. Ada pula serangan pisau massal yang terjadi pada 1 Maret 2014 di Stasiun Kereta Api Kunming Yunman, serangan bom mobil di Urumqi Xinjiang pada 1 Maret 2014, serangan dan ledakan 17 paket bom pada 30 September 2015 di Provinsi Guangxi, pembunuhan mantan guru Tionghoa Fan Jinghui dan penyanderaan beberapa orang yang dilakukan oleh militan ISIS pada 20 November 2015. Peristiwa lain yang juga terjadi adalah serangan di Hotel Radisson Blue di Bamako, Mali, yang mengakibatkan 27 kematian, termasuk tiga warga negara China (Tanner & Bellacqua, 2016).

Tercatat bahwa sepanjang tahun 2013-2015, sering terjadi serangan domestik China. Terdapat klaim bahwa warga negara China juga menghadapi peningkatan jumlah serangan di luar negeri, seperti serangan bom di Thailand pada tahun 2015 yang menewaskan 20 orang termasuk di dalamnya terdapat 7 orang China. Laporan media China tentang insiden teroris juga meningkat secara signifikan dan sebagian besar insiden teroris tersebut terjadi di Xinjiang, kota-kota besar Beijing, Kunming, dan Guangzhou. Sehubungan dengan itu, China meningkatkan keamanan untuk mencegah terjadinya serangan-serangan selanjutnya (Alpermann & Malzer, 2023). Upaya kontra terorisme China kemudian difokuskan pada wilayah Xinjiang yang rentan terhadap serangan teroris serta wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara yang berpotensi tinggi dengan terorisme.

Pada tahun 2014, China melalui *National Counterterrorism Leading Group* (NCLG) dan Kementerian Kemanan Publik menyerukan untuk memperkuat persatuan etnis di Xinjiang, untuk memperkuat kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKT) atas kegiatan keagamaan serta mempromosikan pertumbuhan dan lapangan kerja. Kemudian pada bulan Juni 2015 ditetapkan Undang-Undang Keamanan Nasional Tiongkok yang mengkodifikasi seperangkat kebijakan dan prinsip keamanan nasional yang komprehensif, yang banyak di antaranya terkait dengan memerangi terorisme, separatisme dan ekstremisme agama. Selain itu, ada Amandemen Kesembilan China pada Agustus 2015 atas Hukum Pidana Republik Rakyat China, yang menetapkan definisi hukum serta hukuman untuk banyak pelanggaran terkait terorisme dan yang menjelaskan tindak pidana terorisme dalam beberapa hal yang berbeda dengan Undang-undang kontra terorisme (Tanner & Bellacqua, 2016).

Berdasarkan kebijakan dan undang-undang tersebut maka pada 2017 didirikan Kamp Interniran dengan tujuan mengatasi persoalan mengenai separatisme, terorisme dan ekstremisme. Di dalam Kamp Interniran terdapat kegiatan re-edukasi dan merehabilitasi orang-orang yang telah terpengaruh paham radikalisme dan terindikasi menjadi teroris. Selain itu, Kamp Interniran juga dibentuk untuk membantu peserta memperoleh pendidikan yang lebih baik dan keterampilan kejuruan, mencari pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan mereka. Paling penting, kamp itu dibangun untuk menjaga stabilitas sosial dan perdamaian jangka panjang di Xinjiang (SCIO-PRC, 2019). Akan tetapi informasi mengenai kebijakan tersebut cepat tersebar di berbagai media internasional, terutama pada media-media Barat seperti seperti BBC, *The New York Times*, ASPI, *Al Jazeera* dan beberapa website resmi organisasi internasional dan NGO-INGO yang mengkritik dan mengancam tindakan China dengan berbagai *headline* propaganda.

Berita-berita yang disebarakan pada media-media dipenuhi dengan penilaian bahwa kebijakan kontra terorisme dengan pendirian Kamp Interniran tersebut adalah untuk menekan kebebasan beragama dan mendiskriminasi etnis minoritas Uighur di Xinjiang. Media-media tersebut memberitakan kepada masyarakat internasional bahwa China telah memberlakukan kebijakan yang berimplikasi pada pelanggaran HAM seperti pemenjaraan paksa ribuan muslim Uighur, kerja paksa dan sterilisasi paksa, hingga adanya paksaan terhadap paham komunis di dalam kamp tersebut (Kurniawan et al., 2020). Berita dari media Barat berhasil menarik banyak perhatian dari masyarakat internasional sehingga pemerintah China tidak lolos dari berbagai macam kecaman masyarakat. Mereka menilai bahwa pemerintah China melakukan intoleransi terhadap umat beragama. Kamp Interniran adalah neraka bagi etnis minoritas di Xinjiang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi media internasional China dalam menyikapi propaganda media Barat terkait kebijakan kontra terorisme dengan mendirikan Kamp Interniran yang dianggap sebagai pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Menurut Sugiyono, deskriptif analitis berfokus untuk mendeskripsikan mengenai pokok masalah yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Penelitian deskriptif sebagai gambaran secara sistematis fakta dan ciri objek dan subjek yang diteliti dengan akurat. Tujuan deskriptif analitis adalah untuk menjelaskan hasil analisis data yang diperoleh dalam bentuk narasi. Sumber data penelitian diperoleh melalui studi dokumen yang diambil dari jurnal ilmiah, artikel, buku, report dan juga website resmi (Sugiyono, 2018). Penelitian kualitatif dapat mempermudah dalam meneliti serta menganalisis strategi media internasional China dalam merespon propaganda dari media Barat terkait kebijakan kontra terorisme dengan mendirikan Kamp Interniran yang diduga telah melanggar HAM etnis Uighur di Xinjiang.

Landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini ialah agenda setting dalam media massa. Teori agenda setting pertama kali dirumuskan pada 1972 oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Mereka menjelaskan hubungan antara penekanan yang ditempatkan media massa pada isu-isu tertentu dan pentingnya respon khalayak umum terhadap isu-isu tersebut. Menurut McCombs dan Shaw, media massa mempunyai kekuatan dalam hal menggantikan agenda berita menjadi agenda publik. Selain itu, media juga berpengaruh penting untuk membentuk sudut pandang khalayak yang membaca ataupun menonton suatu isu tertentu, sehingga media memiliki peran melakukan *setting* tentang berita apa yang menjadi penting dan layak untuk mendapatkan perhatian publik.

McCombs dan Shaw membagi agenda setting menjadi tiga jenis utama, yakni:

- 1) Penetapan agenda publik
Penetapan akan dilakukan ketika publik memutuskan atau terpengaruh terhadap pentingnya suatu isu tertentu, sehingga ketika publik mulai merespon isu tersebut maka, media secara reaktif menanggapi audiens dengan menampilkan liputan terkait isu atau masalah tersebut.
- 2) Pengaturan agenda media
Setelah publik terpengaruh maka, pada tahap ini peran media adalah menentukan dan memutuskan untuk menyebarkan informasi tersebut pada siaran atau cetakan mereka.
- 3) Pengaturan agenda kebijakan
Ini berkaitan dengan respon publik terhadap suatu isu yang berhubungan dengan elit politik dan penguasa lainnya dalam mengambil suatu keputusan ataupun kebijakan tertentu (McCombs & Shaw, 2017).

Adapun korelasi penelitian ini dengan teori agenda setting adalah adanya media yang dijadikan sebagai *tools* oleh China untuk melakukan propaganda balasan terhadap media Barat yang telah menggiring opini terkait kebijakan kontra terorisme dan pendirian Kamp Interniran sebagai tempat diskriminasi etnis minoritas Islam Uighur di Xinjiang. Media menjadi jembatan dalam penyampaian informasi dari sudut pandang yang berbeda dari China dengan tujuan untuk meredam propaganda media Barat yang dianggap telah mencoreng citra negaranya. Sejalan dengan apa yang ditekankan oleh McCombs dan Shaw, bahwa media berperan penting untuk menarik perhatian, opini dan reaksi khalayak umum. Oleh karena itu, berita mengenai tindakan diskriminasi China terhadap

etnis Uighur telah berhasil mendapatkan perhatian masyarakat internasional dan muncul reaksi akan isu tersebut, sehingga berdampak pada China yang mendapatkan kecaman. Dalam rangka mengambil kembali kepercayaan publik, maka China juga melakukan hal yang sama yaitu memberitakan informasi terkait etnis Uighur dengan sudut pandang yang berbeda sehingga publik bisa menilai kebenaran informasi dari dua pihak baik itu media China ataupun media Barat.

Kesinambungan antara teori agenda setting dengan penelitian ini dapat dilihat berdasarkan tiga jenis agenda setting, yaitu:

1) Agenda publik

Dalam hal ini agenda publik sudah terbentuk dimana hal itu terjadi setelah media Barat terlebih dahulu mengekspos berita mengenai kebijakan China yang dianggap telah melanggar hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di China. Berita mengenai diskriminasi tersebut sudah berhasil menarik perhatian dan mendapatkan opini dari masyarakat internasional;

2) Agenda media

Pada tahap ini, terdapat peran dari media-media internasional China seperti CCTV, *China Daily*, *Global Times*, CGTN yang disetting khusus untuk memberitakan informasi-informasi yang menunjukkan sisi lain dari berita yang disampaikan oleh media Barat, baik itu melalui saluran televisi, Youtube, website dan juga menggunakan media sosial seperti Twitter;

3) Agenda kebijakan

Ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah China dalam mengeluarkan keputusan dan kebijakan terkait dengan isu yang beredar pada media massa. Kemudian tentang pemerintah China yang mengeluarkan *statement* bahwa tidak ada tindakan diskriminasi, melainkan kebijakan kontra terorisme yang merupakan bentuk upaya dari negara tersebut untuk mencegah adanya terorisme dan kejahatan ekstrimisme lain di dalam negaranya. Kebijakan China ini dinilai oleh media Barat sebagai tindakan diskriminasi. Pembuatan Kamp Interniran dianggap sebagai penjara yang dikhususkan bagi etnis muslim minoritas Uighur sehingga kebijakan China tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

• Kebijakan Kontra Terorisme dan Kamp Interniran China

Kebijakan kontra terorisme merupakan upaya pemerintah China untuk memberantas aktivitas teroris yang sering terjadi di masa lalu, mencegah penyebaran ekstrimisme berdasarkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi antar kelompok etnis. Pemerintah China berkomitmen penuh dalam menjaga kestabilan dan persatuan etnis serta menjunjung supremasi hukum sosialis. Kebijakan kontra terorisme dibuat atas dasar mencegah kekuatan teroris yang telah lama berupaya untuk menghancurkan rasa persatuan dan keberagaman etnis di Xinjiang. Oleh karena itu kebijakan ini merupakan langkah konkrit dari pemerintah China untuk menentang segala bentuk terorisme dan ekstremisme serta menindak sesuai dengan hukum nasional negaranya dan pastinya menghormati HAM setiap masyarakat Xinjiang tanpa melihat perbedaan etnis.

Perjuangan China melawan terorisme di Xinjiang berpegang pada prinsip supremasi hukum. Kebijakan ini memiliki kerangka hukum yang jelas serta bersifat ilmiah, terstandarisasi, prosedural dan operatif. Adapun Undang-undang yang menaungi kebijakan kontra terorisme ialah Undang-Undang Penanggulangan Terorisme Republik Rakyat Tiongkok, Tindakan Daerah Otonomi Uighur Xinjiang dalam Pelaksanaan Undang-Undang Penanggulangan Terorisme Republik Rakyat Tiongkok, Peraturan Daerah Otonomi Uighur Xinjiang tentang Deradikalisasi, dan undang-undang serta peraturan lainnya terkait dengan pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan yang didirikan di Xinjiang (SCIO-PRC, 2019).

Implementasi dari kebijakan kontra terorisme ialah pendirian Kamp Interniran. Kamp Interniran merupakan kamp pendidikan ulang (*Re-education*) bagi orang-orang yang dinilai telah terpengaruh paham radikal. Kebijakan ini juga ditujukan kepada masyarakat Xinjiang yang berperilaku kriminal dan berpotensi menjadi teroris serta perilaku ekstremis yang membahayakan

masyarakat Xinjiang lainnya. Adapun orang-orang yang berada di dalam Kamp Interniran tersebut ialah mereka yang memenuhi tiga kategori, yaitu:

- 1) Orang yang dihasut, dipaksa atau dibujuk untuk ikut serta dalam kegiatan teroris atau ekstremis, atau orang yang ikut serta dalam kegiatan teroris atau ekstremis dalam keadaan yang tidak cukup serius untuk dianggap sebagai kejahatan;
- 2) Orang-orang yang dihasut, dipaksa atau dibujuk untuk berpartisipasi dalam kegiatan teroris atau ekstremis, atau orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan teroris atau ekstremis yang menimbulkan bahaya nyata, yang kesalahan subyektifnya tidak dalam, orang yang mengakui pelanggaran mereka dan menyesali perbuatannya di masa lalu sehingga tidak perlu dihukum atau dapat dibebaskan dari hukuman, dan yang telah menunjukkan kesediaan untuk menerima pelatihan; dan
- 3) Orang-orang yang divonis dan dijatuhi hukuman penjara atas kejahatan teroris atau ekstremis dan setelah menjalani hukumannya, dinilai masih berpotensi menimbulkan ancaman bagi masyarakat, dan yang telah diperintahkan oleh pengadilan rakyat sesuai dengan undang-undang untuk mengenyam pendidikan di Kamp Interniran (SCIO-PRC, 2019).

Dari ketiga kategori tersebut, dapat dinyatakan bahwa kebijakan Kamp Interniran bukan berdasarkan etnis tetapi berdasarkan individu yang memenuhi ketiga kategori tersebut, yang pantas untuk dimasukkan ke dalam Kamp Interniran. Selain itu, Kamp Interniran juga tidak hanya diperuntukkan bagi etnis Uighur saja melainkan terdapat beberapa etnis seperti suku Kazakh, Kyrgyz, dan etnis muslim Turki lainnya, Kristen, serta beberapa warga negara asing termasuk warga Kazakhstan, meskipun jumlah yang ada di dalam Kamp Interniran jumlahnya didominasi oleh etnis Uighur. Ini terjadi karena ketika diadakan pemeriksaan berlandaskan ketiga kategori diatas, banyak dari etnis Uighur yang terindikasi menjadi teroris.

Namun, sesuai dengan Pasal 29 dan 30 UU Antiterorisme, orang-orang dalam kategori pertama hingga ketiga akan diberikan bantuan dan menerima pendidikan, atau belajar menggunakan bahasa Mandarin standar, baik lisan dan tulisan yang diamanatkan oleh konstitusi serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan peserta pelatihan untuk studi mereka. Kemudian, untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang hukum China, Kamp Interniran juga menyediakan kursus-kursus hukum, yang diambil sebagai mata rantai utama untuk memperkuat kesadaran berbangsa dan hukum nasional (SCIO, 2019).

Selanjutnya untuk memperbaiki kurangnya keterampilan kerja dan kesulitan mencari pekerjaan, disediakan program pelatihan keterampilan kejuruan. Pusat pendidikan dan pelatihan untuk mengasah keterampilan kejuruan ini menjadi saluran penting untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta pelatihan. Berdasarkan permintaan lokal dan peluang kerja, kursus yang diberikan di kejuruan tersebut meliputi pembuatan garmen, pengolahan makanan, perakitan produk elektronik, penataan huruf dan pencetakan, layanan tata rambut dan kecantikan, *e-commerce*, perawatan dan perbaikan mobil, desain dan dekorasi interior, pembiakan ternak, pomikultur, pijat terapi, jasa rumah tangga, kerajinan tangan, merangkai bunga, tenun permadani, melukis, dan seni pertunjukan seperti musik dan tari (SCIO, 2019).

Meskipun demikian, pendirian Kamp Interniran mendapat kecaman dari berbagai pihak. Hal ini karena banyak media Barat yang menggiring opini publik internasional bahwa Kamp Interniran merupakan penjara besar yang didirikan oleh pemerintah China untuk mengurung serta mendiskriminasi salah satu etnis, yakni Uighur di Xinjiang. Media Barat mengklaim bahwa pendirian kamp tersebut membatasi pergerakan dan kebebasan etnis Uighur. Media Barat juga menyebut bahwa kamp tersebut merupakan tempat untuk mengajari etnis Uighur yang mayoritas beragama islam untuk mempelajari faham komunis, sehingga tindakan dari pemerintah China terbukti melanggar kebebasan beragama (BBC, 2022).

Propaganda dari media Barat berhasil mendapatkan perhatian publik sehingga banyak negara yang memberikan kecaman terhadap China. Selain itu, banyak juga aksi dari masyarakat sipil global yang menentang tindakan China. China menyadari bahwa citra negaranya telah memburuk di mata dunia internasional dan mengalami kerugian, baik itu dalam segi ekonomi maupun politik.

- **Propaganda Disinformasi China Untuk Merespon Propaganda Media Barat**

Akibat dari propaganda media Barat, China mendapatkan banyak kecaman internasional dan juga desakan dari PBB terkait kebijakan kontra terorisme dengan mendirikan Kamp Interniran. Menurut mereka, kebijakan tersebut akan berimplikasi pada pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Ini membuat pemerintah China aktif memberikan respon terhadap berita propaganda dari media Barat terkait kebijakan tersebut. Media China mengklaim bahwa terdapat disinformasi terkait kebijakan kontra terorisme dan pendirian Kamp Interniran dimana menurut media Barat, merupakan penjara yang dikhususkan bagi etnis muslim minoritas Uighur. Padahal, yang terjadi sebenarnya ialah, Kamp Interniran tersebut tidak hanya diperuntuk bagi etnis Uighur saja melainkan terdapat beberapa etnis seperti suku Kazakh, Kyrgyz, dan etnis muslim Turki lainnya. Selain itu, ada pula yang beragama kristen, serta beberapa warga negara asing termasuk warga Kazakhstan, meskipun jumlah yang ada di dalam Kamp Interniran jumlahnya didominasi oleh etnis Uighur (Nebehay, 2019).

Pada tahun 2018, ketika komite anti-diskriminasi PBB menyuarakan keprihatinan atas perlakuan Tiongkok terhadap etnis Uighur, tepat setelah pernyataan tersebut, pada 12 Agustus 2018 media China yaitu *Global Times* mengeluarkan pernyataan bahwa China mencegah Xinjiang menjadi 'China's Syria' atau 'China's Libya' dan kebijakan pemerintah setempat menyelamatkan banyak nyawa serta menghindari tragedi besar seperti terorisme (Reuters Staff, 2018). Kemudian, pada tanggal 13 Agustus 2018, dalam pertemuan PBB di Jenewa, delegasi dari China mengatakan kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa: "Tidak ada yang namanya diskriminasi di Xinjiang dan sama sekali tidak benar bahwa Tiongkok memasukkan 1 juta orang Uighur ke dalam penjara Kamp Interniran". Delegasi China menekankan bahwa: "Warga Xinjiang, termasuk Uighur, menikmati kebebasan dan hak yang sama. Kamp didirikan untuk membina orang-orang yang menunjukkan perilaku ekstremisme atau separatisme agama ringan untuk membantu rehabilitasi dan membina secara hukum China" (Nebehay, 2018).

Liu Xiaoming, Duta Besar Tiongkok untuk Britania Raya, menulis sebuah artikel sebagai tanggapan atas laporan *Financial Times* berjudul "*Crackdown in Xinjiang: Where have all the people gone?*" (Feng, 2018). Menurut Liu, langkah-langkah pendidikan dan pelatihan yang diambil oleh pemerintah daerah Xinjiang tidak hanya secara efektif mencegah infiltrasi ekstremisme agama dan membantu mereka yang tersesat dalam ide-ide ekstremis untuk menemukan jalan kembali, tetapi juga memberi mereka pelatihan kerja dan untuk membangun kehidupan yang lebih baik (uk.chineseembassy, 2018). Pada 10 September 2018, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang mengutuk laporan yang dikeluarkan oleh *Human Rights Watch* tentang Kamp Interniran. Geng mengatakan bahwa organisasi ini selalu penuh dengan prasangka dan memutarbalikkan fakta tentang China. Terbukti bahwa Xinjiang menikmati stabilitas sosial secara keseluruhan, pembangunan ekonomi yang baik dan koeksistensi yang harmonis dari berbagai kelompok etnis. Ini karena serangkaian tindakan yang diterapkan di Xinjiang dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas, pembangunan, solidaritas dan mata pencaharian masyarakat, menindas etnis yang terlibat kegiatan separatis, kejahatan kekerasan dan teroris, menjaga keamanan nasional, serta melindungi kehidupan dan harta benda orang (Global News, 2018).

Pada 18 Maret 2019, pemerintah China merilis buku putih tentang kontra terorisme dan deradikalisasi di Xinjiang. Buku putih itu mengklaim bahwa: "Sebuah negara di bawah supremasi hukum, China menghormati dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip konstitusinya". Di buku putih tersebut terdapat penegasan bahwa Xinjiang tidak memiliki kasus kekerasan teroris selama lebih dari dua tahun berturut-turut. Penetrasi ekstremis telah secara efektif diatasi, dan jaminan sosial telah meningkat secara signifikan (SCIO PRC, 2019). Pada November 2019, Duta Besar Tiongkok untuk Inggris menanggapi berita BBC tentang dokumen baru yang bocor di Xinjiang dengan menyebut dokumen tersebut sebagai berita palsu. Pada 6 Desember 2019, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying menuduh AS "*Hypocritical*" atas masalah hak asasi manusia terkait tuduhan penyiksaan di Kamp Interniran. Oleh karena itu China mendesak komisaris tinggi dan kantor Hak Asasi Manusia PBB agar mematuhi misi dan prinsip Piagam PBB dengan cermat, menghormati kedaulatan China secara adil dan obyektif dalam menjalankan tugasnya dan tidak mendengarkan informasi sepihak (AP Archive, 2019).

Pada September 2020, di tengah kecaman dari negara-negara Barat, Presiden Xi Jinping mengakui keberhasilan kebijakan Kamp Interniran dan mengatakan bahwa pemerintah wilayah

Xinjiang menyelenggarakan pelatihan berorientasi ketenagakerjaan dan keterampilan tenaga kerja untuk 1,29 juta pekerja per tahun dari tahun 2014-2019 (Lau & Lew, 2020). Pada Maret 2021, menyusul sanksi yang dijatuhkan kepada beberapa pejabat China oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris Raya dan Kanada, pemerintah China menanggapi dengan sanksi balasan terhadap beberapa individu dan kelompok yang mengkritik China atas kamp tersebut, termasuk lima anggota Parlemen Eropa, di antaranya Reinhard Butikofer, Kepala Delegasi Parlemen Eropa ke China, seorang sarjana Jerman Adrian Zenz, dan Yayasan Aliansi Demokrasi nirlaba. Kemudian pada Juni 2021, *Pro Publica* dan *The New York Times* mendokumentasikan kampanye propaganda terhadap China, yang oleh pemerintah China direspon melalui Twitter dan YouTube dengan menampilkan 5.000 video yang menunjukkan dan membuktikan bahwa di Uighur, Xinjiang tidak ada orang yang diksiksa maupun diasingkan serta menyangkal pelanggaran HAM (Emmott, Robin dan Brunnstrom, 2021).

Pada tahun 2022, Duta Besar China di Genewa, Chen Xu mengadakan konferensi pers yang dihadiri oleh media China dan juga media Barat. Dalam konferensi tersebut, Xu mengatakan bahwa China sangat menghormati HAM dan tetap menjalankan seluruh mekanisme yang ditentukan dan menentang politisasi isu-isu hak asasi manusia dan tindakan tekanan publik yang memprovokasi konfrontasi, dan bersama-sama mempromosikan tata kelola hak asasi manusia global ke arah yang lebih adil. Xu menegaskan bahwa China menolak keras dengan apa yang digaungkan oleh OHCHR mengenai "Assesment in Xinjiang". Kalimat tersebut menurut China merupakan bentuk dari manipulasi politik negara Barat dengan memanfaatkan isu Uighur di Xinjiang untuk kepentingan nasional mereka. Tindakan negara Barat sangat mendistorsi hukum dan kebijakan nasional China, mencoreng perjuangan Xinjiang melawan terorisme dan ekstremisme. Menurut Xu, kebijakan China terkait kontra terorisme berhasil mencapai hak asasi manusia yang luar biasa, khususnya 25 juta orang dari semua kelompok etnis, termasuk Uighur di Xinjiang (geneva.china-mission.gov, 2022).

Pada tahun 2023, juru bicara Kementerian Luar Negeri China dalam konferensi pers mengatakan pada media bahwa mereka menerima delegasi Arab dan mengunjungi wilayah Xinjiang, dimana sesuai dengan pemberitaan, terdapat diskriminasi terhadap etnis muslim Uighur di wilayah tersebut. Anggota delegasi mengatakan bahwa perjalanan itu membuka mata mereka tentang Xinjiang yang makmur. Mereka memuji pencapaian model pembangunan China, terutama keberhasilannya dalam mengakhiri kemiskinan ekstrem. Mereka mencatat bagaimana wilayah tersebut digambarkan secara berbeda di media Barat. Mereka melihat Xinjiang yang menikmati keharmonisan sosial dan ekonomi yang berkembang pesat dengan penduduk dari semua kelompok etnis, hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Xinjiang membuat kemajuan lebih cepat dalam berbagai usaha. Muslim setempat dengan bebas menjalankan hak-hak etnis dan agama mereka sesuai dengan hukum. Apa yang disebut "genosida" dan "penganiayaan agama" hanyalah kebohongan. Negara Arab telah memuji kepedulian yang telah diterima oleh muslim di Xinjiang dan orang-orang dari kelompok etnis minoritas lainnya dan menyatakan dukungan kuat mereka terhadap upaya China untuk mempromosikan pembangunan Xinjiang dan memastikan stabilitasnya (Global Times, 2023).

- **Peran Media China Dalam Propaganda Disinformasi**

Meskipun pemerintah China aktif dalam memberikan respon atau tanggapan di berbagai forum internasional dan melakukan berbagai konferensi pers, tidak membuat media-media Barat berhenti memberitakan dan mempropaganda ke publik terkait isu diskriminasi etnis Uighur melalui kebijakan China tentang Kamp Interniran sebagai upaya kontra terorisme dan ekstrimisme di negaranya. Tentu saja, pemerintah China tidak tinggal diam terhadap pemberitaan oleh media Barat yang dianggap mencoreng citra negaranya tersebut. Oleh karena itu, China melakukan strategi propaganda berupa kampanye disinformasi melalui media-media internasionalnya seperti *Global Times*, *China Global Television Network (CGTN)*, *China Central Television (CCTV)* dan juga *China Daily* sebagai bentuk perlawanan terhadap monopoli media internasional (media Barat) (Alpermann & Malzer, 2023).

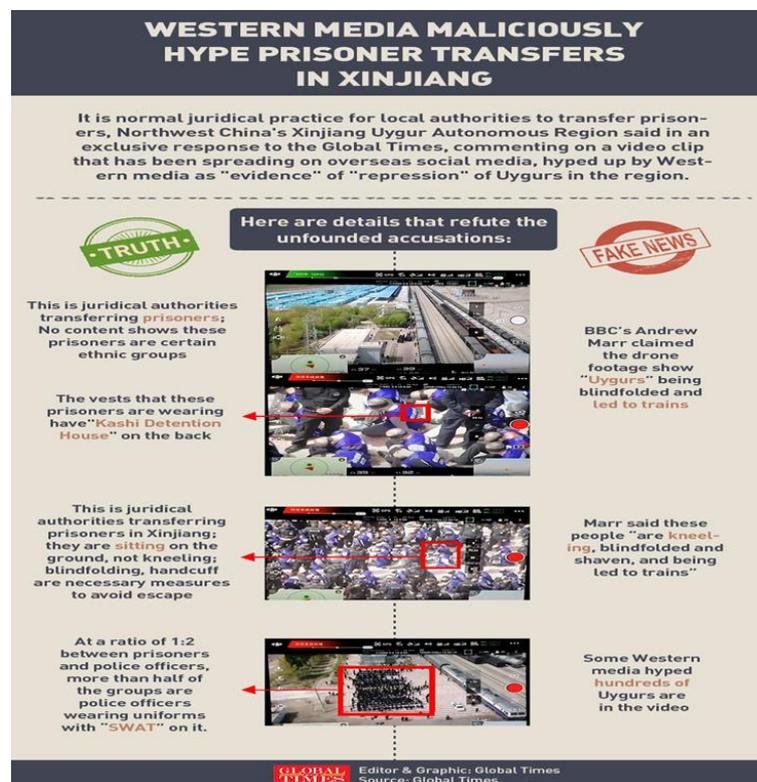
Selain itu China membentuk organ utama, yaitu Departemen Propaganda dan *United Front Work Departemen (UFWD)*. Kedua departemen inilah yang bertugas untuk melakukan perjuangan opini publik serta mengarahkan, mengawasi dan mengontrol langsung media-media dalam melakukan propaganda untuk membalas media ekstrim Barat yang secara agresif memberitakan kebohongan terhadap publik untuk ikut mengecam China. Strategi propaganda China ini semakin menegaskan

kepada media internasional, bahwa mereka bertujuan memperoleh kembali kepercayaan publik dengan memperkuat strategi medianya dengan harapan publik dapat melihat isu tersebut melalui dua sudut pandang yang berbeda sehingga bisa menilai kebenaran secara proporsioanal. China berusaha untuk mempromosikan sudut pandang yang disetujui dan menekan sudut pandang yang berlawanan dengan media Barat (Crisis, 2020).

Adapun strategi media internasional China dalam menyikapi media propaganda Barat terkait etnis Uighur di Xinjiang, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Global Times

Media *Global Times* menampilkan pernyataan dari Duta Besar China untuk Inggris Liu Xiaoming terkait adanya cuplikan video yang memperlihatkan sekelompok orang, dengan mata tertutup duduk di tanah, dengan tangan diborgol. Media Barat *BBC* mengatakan bahwa pemerintah China dengan kejam mentransfer tahanan di Xinjiang, dan video yang beredar tersebut dijadikan sebagai bukti penindasan terhadap muslim Uighur di Kamp Interniran.

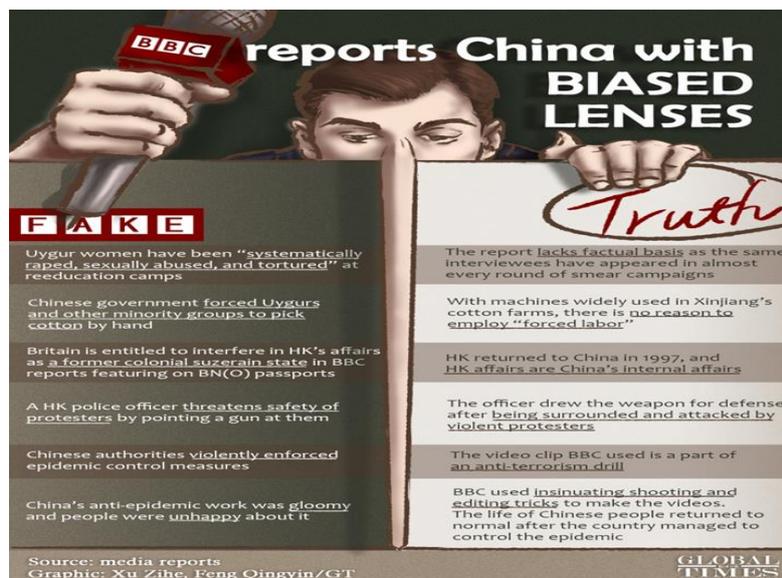


Gambar 2. Media *Global Times* Tentang Hoax Transfer Tahanan Xinjiang (Xin, 2020).

Menanggapi berita tersebut, *Global Times* menampilkan pernyataan dari Duta Besar China untuk Inggris Liu Xiaoming yang menyatakan bahwa video yang ditampilkan tidak memiliki unsur kebenaran. Dinyatakan bahwa setiap negara memiliki otoritas untuk kegiatan yuridis dalam memerangi kejahatan di negaranya, termasuk memindahkan tahanan. Akan tetapi ini tidak berkaitan dengan etnis Uighur karena sesungguhnya kejahatan tidak pernah menargetkan kelompok etnis atau agama tertentu. *BBC* mengklaim bahwa video yang ditampilkan merupakan video asli. *BBC* menjelaskan bahwa video tersebut telah diautentikasi oleh badan intelijen Barat dan pakar Australia. Liu Xiaoming menegaskan bahwa pemindahan tahanan itu merupakan suatu hal yang normal dan semua negara melakukan hal tersebut. Ia mengatakan: "Jangan mengabaikan seragam rompi biru dari para tahanan yang bertuliskan "Kashi Prison" dan para penjaga yang bertuliskan "SWAT", karena tahanan dalam video tersebut merupakan tahanan kelas berat dan ini sama sekali tidak berkaitan dengan Uighur" (Xin, 2020).

Selain itu, *Global Times* menegaskan kepada media Barat untuk berhenti menyebarkan opini jelek dan mengintervensi setiap aturan nasional negaranya. Informasi yang disampaikan pada publik merupakan tindakan kejahatan untuk menyebut pemindahan tahanan sebagai "penindasan kelompok etnis" di Xinjiang. Tidak ada informasi dari video yang menunjukkan kejadian itu terkait dengan Uighur atau kelompok etnis lain. Tindakan pemindahan tahanan dilakukan dengan tujuan untuk menghindari tumbuhnya komplotan di Penjara. China memiliki aturan nasionalnya yang ketat tentang pemindahan tahanan - borgol dan penutup mata adalah tindakan yang diperlukan untuk menghindari kemungkinan melarikan diri atau perselisihan, atau kolusi di antara narapidana. Tahanan yang ada dalam video tersebut merupakan para tahanan yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat dan pelanggaran tindakan apapun dapat merusak jaminan terhadap keamanan dan kehidupan sosial.

Global Times juga menegaskan bahwa media Barat yang disponsori AS sangat sibuk mengurus peraturan China mengenai tahanan, sedangkan para ahli mencatat bahwa dibandingkan dengan peraturan China tentang penjara sesuai dengan undang-undangnya, AS memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia yang terkenal terhadap tahanan. Organisasi non-pemerintah Amerika juga mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang meluas terhadap tahanan di AS. Karena alasan tersebut maka hentikan penyebaran opini yang tidak terbukti (Xin, 2020).



Gambar 3. *Global Times* tentang human abuse (Sheng, 2021)

Gambar 3, memperlihatkan dua ilustrasi yang berbeda dimana dituliskan "Fake" di bagian kiri, yang berisikan berita dari media Barat seperti BBC dan "Truth" di bagian kanan yang berupa perlawanan dari media China yaitu *Global Times*. *Global Times* menegaskan terkait pemberitaan BBC yang kerap kali melakukan kampanye propaganda demonisasi yang memfitnah China atas kebijakannya di daerah otonomi Uighur, Xinjiang. Hal tersebut dinilai sangat bertolak belakang dengan realitas, dimana semua etnis di daerah tersebut diperlakukan sama dan menikmati hak yang sama. Akan tetapi kenyataan ini sering diabaikan, didistorsi dan dijelek-jelekan oleh media Barat melalui narasi yang tidak berdasar dan penuh dengan kebohongan tentang genosida ataupun penjara di Xinjiang. *Global Times* justru dengan tegas mengatakan bahwa media Barat arus utama yang kebanyakan datang dari AS mengkampanyekan bahwa China intoleransi terhadap Islam, akan tetapi justru negara-negara Barat yang sering melakukan invasi ke negara-negara mayoritas Islam seperti Irak, Afghanistan, Libya dan Suriah. Negara Barat seakan menunjukkan kepedulian mereka terhadap Islam di Uighur sedangkan mereka sendiri

merupakan pelaku pelanggaran HAM di negara-negara Islam khususnya di Timur Tengah (Sheng, 2021).

Global Times dengan lantang menjelaskan niat dan maksud terselubung dari media Barat arus utama yang dikontrol oleh AS dan para sekutunya, dimana mereka berperan sebagai aktivis kemanusiaan yang berantusias pada Islam Uighur di Xinjiang dengan maksud yang tidak lain ialah untuk mengobarkan perang propaganda untuk melawan China yang dianggap sebagai saingan geopolitik Barat. Karenanya, melalui media ini, China ingin menyampaikan bahwa upaya propaganda demonisasi Barat tidak pernah berhasil. Buktinya, sepanjang tahun 2010 hingga 2018, orang Uighur mengalami peningkatan di Xinjiang sebesar 25% atau setara dengan 2,55 juta dengan total populasi 12,72 juta orang. Sehingga berita genosida itu tidak benar, dan untuk membuktikan hal tersebut China telah mendatangkan 1.200 diplomat, jurnalis dan berbagai pemuka agama untuk mengunjungi Xinjiang serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari dan mengamati upaya China dalam melawan terorisme, ekstrimisme dan separatisme. Para pengunjung juga telah memberikan kesaksian yang terperinci serta dapat dipercaya walaupun sebanyak 24 negara Barat berusaha mengutuk China di Dewan HAM PBB (Sheng, 2021).

2) China Daily

Selain *Global Times*, kampanye disinformasi juga digaungkan oleh media internasional *China Daily*. Media ini sering menepis isu-isu miring dari media Barat. *China Daily* juga melakukan tuduhan balik kepada media Barat yang kerap kali memutarbalikan fakta. *China Daily* menegaskan bahwa China merupakan salah satu negara Asia yang anti terorisme dan tidak ada pengampunan terhadap tindakan teroris. *China Daily* menegaskan bahwa perbedaan paham China dan Barat terlihat jelas dimana negara Barat kurang tegas dalam menyikapi terorisme sehingga tidak mengejutkan apabila beberapa wilayah Barat sering mengalami serangan teroris karena tidak mengambil langkah-langkah keamanan yang ketat (chinadaily, 2018).

Selain itu, media Barat mudah terprovokasi oleh kelompok anti China yakni *The East Turkestan Islamic Movement (ETIM)*, yang mana kelompok ini sering melakukan resistensi anti China di kalangan masyarakat Xinjiang (Yinmeng, 2021). *China Daily* meminta agar publik “*smart*” dalam menilai pemberitaan sehingga tidak termakan adanya *hoax*, karena terdapat banyak alasan mengapa media Barat selalu menyerang setiap kebijakan yang diterapkan oleh China dengan dalil pelanggaran HAM. Perbedaan paham ideologi dengan negara Barat menjadi alasan dasar adanya tuduhan pelanggaran HAM. Selain itu ada kepentingan dari negara Barat yang ingin merusak reputasi China di mata dunia (chinadaily, 2018).

3) China Central Television (CCTV)

CCTV juga gencar melakukan kampanye disinformasi melawan media Barat bahwa tidak ada penjara, diskriminasi etnis ataupun genosida di Xinjiang. CCTV menginformasikan bahwa upaya dari pemerintah China untuk memberantas terorisme sekaligus memberantas kemiskinan dimana orang-orang yang berada dalam Kamp Interniran mendapatkan banyak ilmu, karena ada pelatihan kejuruan yang bertujuan sebagai bekal ke depan, agar dapat bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan keluarga mereka. China menggunakan metode yang manusiawi untuk mengubah “ekstremis” menjadi “orang normal”.

CCTV juga menyinggung negara Barat bahwa China tidak pernah mencampuri “dapur” negara Barat, mengapa negara Barat tidak melakukan hal yang sama. Urusan domestik China sepertinya sangat menarik untuk ditelusuri oleh negara Barat sehingga selalu mencari celah untuk memperkeruh keamanan, baik dari dalam dan luar China. CCTV juga memberitakan bahwa hal yang perlu dicurigai ialah media-media ekstrem Barat yang berkoordinasi dengan kelompok yang terindikasi teroris seperti ETIM yang jelas sangat berbahaya. Informasi berupa fitnahan dari media Barat seringkali diambil dari

kelompok ETIM. Media Barat mengklaim bahwa berita yang disebarkan di media internasional adalah kebenaran. China mengharapkan agar publik tidak keliru dan pandai dalam memilah sumber informasi (CCTV, 2018).

4) *China Global Television Network (CGTN)*

CGTN juga gencar melakukan serangan propaganda dengan merilis banyak video di Youtube, serta situs lain yang diblokir di China seperti Twitter, untuk menunjukkan situasi di Xinjiang yang berbeda dengan pemberitaan media Barat. Selain itu CGTN juga merilis dua film dokumenter, yang berjudul "*Fighting Terrorism in Xinjiang*," pada 5 Desember 2019 dan "*The Black Hand – ETIM and Terrorism in Xinjiang*" pada 7 Desember, untuk menunjukkan bahwa ETIM merupakan sebuah kelompok terorisme anti China (CGTN, 2020b). Tidak hanya itu, CGTN membantah adanya orang hilang seperti yang dituduhkan oleh BBC. Pada tahun 2019, BBC memberitakan mengenai beberapa orang etnis Uighur yang hilang di twitter dengan tagar #stillnoninfo. CGTN kemudian melakukan penyelidikan di Kamp Interniran di Xinjiang dan menemukan bahwa tuduhan BBC tersebut tidak terbukti. Orang-orang Uighur yang hilang pada kenyataannya ada dan melakukan aktivitas seperti biasa. CGTN kemudian mengungkap rutinitas kehidupan mereka sehari-hari, dan juga ada video dokumenter singkat tentang etnis Uighur. Wawancara dengan Uighur menunjukkan bahwa Uighur di Xinjiang tidak mendapatkan diskriminasi apapun. Sebaliknya, mereka bersyukur karena memiliki pelatihan pendidikan kejuruan dan hal ini membantu mencegah mereka dari ekstremisme (CGTN, 2020a)

Sampai dengan saat ini, kedua media arus utama, baik Barat maupun China masih saling melakukan propaganda. Barat menggunakan media propaganda demonisasi sedangkan China menggunakan media propaganda kampanye disinformasi. Melalui propaganda demonisasi, media Barat melakukan penyebaran isu tersebut secara ekstrem. Mereka memberitakan terkait Uighur dan segala kebijakan China yang dianggap telah melanggar hak asasi manusia, sedangkan China juga dengan agresif menyerang media Barat sebagai bentuk pertahanan diri dan mengungkapkan maksud dan tujuan dari propaganda Barat. Kedua media ini saling menyerang satu sama lain. Sehingga media dijadikan sebagai "*battlefield*" (Deutch, 2018).

Implikasinya, masyarakat internasional pun disajikan informasi melalui dua sudut pandang yang berbeda. Media Barat berusaha memberikan informasi tentang dampak dari kebijakan China mengenai kontra terorisme dan Kamp Interniran, dimana kebijakan itu dinilai sebagai tindakan diskriminasi terhadap etnis Uighur dengan anggapan bahwa etnis Uighur ialah etnis yang menghasilkan bibit teroris. Sedangkan China melalui media internasionalnya berusaha meyakinkan masyarakat internasional bahwa kebijakan yang diambil merupakan langkah tepat untuk memberantas terorisme di negaranya. Kebijakan tersebut tidak dibuat khusus untuk etnis Uighur, melainkan semua etnis yang ada di wilayah Xinjiang. Sehingga, informasi yang disampaikan oleh media Barat, menurut media China, merupakan fitnah terhadap negara China. Oleh karena itu langkah pemerintah China ialah melakukan kampanye disinformasi melalui media internasional untuk melawan propaganda media Barat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi yang diterapkan oleh pemerintah China untuk membalas media propaganda Barat ialah strategi kampanye disinformasi. Melalui strategi ini China menggunakan media-media internasionalnya seperti *Global Times*, CCTV, *China Daily* dan juga CGTN. Media-media internasional China ini secara kompak melakukan kampanye disinformasi untuk melawan propaganda demonisasi dari media Barat. Media-media China ini membantah semua tuduhan, fitnahan ataupun boikot dari media Barat. Mereka menampilkan sudut pandang yang berbeda, bahwa tidak ada penjara massal di Xinjiang melainkan Kamp Interniran untuk rehabilitasi sekaligus kamp kejuruan dan pelatihan tenaga kerja.

Media-media China juga menolak adanya diskriminasi etnis Uighur ataupun genosida. Kebijakan China adalah murni sebagai langkah mencegah adanya terorisme, ekstremisme dan separatisme yang sesuai dengan undang-undang nasional negaranya. Media-media China juga secara proaktif melakukan serangan propaganda terhadap media Barat yang jelas berkoordinasi dengan

kelompok ETIM dan memiliki maksud dan tujuan lain untuk melawan China. Terjadi “*battlefield*” dimana negara-negara Barat, yang dengan ekstrem memberitakan Uighur dan segala kebijakan China yang dianggap telah melanggar hak asasi manusia.

Demikian juga dengan China, secara agresif menyerang media Barat sebagai bentuk pertahanan diri dan mengungkapkan maksud dan tujuan dari propaganda Barat. Upaya China tersebut merupakan bentuk mengembalikan citra dan kepercayaan dari publik maupun negara lain terhadap negaranya. Sehingga publik diharapkan dapat menilai dari dua sudut pandang yang berbeda terkait informasi yang beredar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpermann, B., & Malzer, M. (2023). “In Other News”: China’s International Media Strategy on Xinjiang—CGTN and New China TV on YouTube. In *Modern China*. <https://doi.org/10.1177/00977004231169008>.
- AP Archive. (2019). China: Guantanamo report shows US hypocrisy. <https://www.youtube.com/watch?v=zsHX2ffwdPs>.
- BBC. (2022). Who are the Uyghurs and why is China being accused of genocide? Bbc.Com. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-22278037>.
- cctv. (2018). “Focus Interview” 20181016 Build a solid foundation for source governance. Tv.Cctv.Com. <http://tv.cctv.com/2018/10/16/VIDEVR9aq34SsDMrB6IRGnh181016.shtml>
- CGTN. (2020a). CGTN Exclusive: Western propaganda on Xinjiang “camps” rebutted. In CGTN. <https://www.youtube.com/watch?v=Wb-MNi8E-TA>.
- CGTN. (2020b). memories of fighting terrorism in Xinjiang. <https://www.cgtn.com/special/memories-of-fighting-terrorism-in-xinjiang.html>.
- chinadaily. (2018). What China is doing in Xinjiang is being deliberately distorted. Chinadaily.Com.Cn. <http://usa.chinadaily.com.cn/a/201808/14/WS5b72d1fba310add14f385be2.html>.
- Crisis, U. (2020). “The Happiest Muslims in the World.” July.
- Deutch, G. (2018). Social Media Has Become a Global Battlefield. Theatlantic.Com. <https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/10/social-media-battlefield-internet/571960/>.
- Emmott, Robin dan Brunnstrom, D. (2021). West sanctions China over Xinjiang abuses, Beijing hits back at EU. Reuters.Com. <https://www.reuters.com/article/uk-usa-china-eu-sanctions-idUSKBN2BE2LF>.
- Feng, E. (2018). Crackdown in Xinjiang: Where have all the people gone? Financial Times. <https://www.ft.com/content/ac0ffb2e-8b36-11e8-b18d-0181731a0340>.
- Geneva.china-mission.gov. (2022). Opening remarks by H.E. Ambassador Chen Xu at the Press Conference for Chinese and Foreign Media. Geneva.China-Mission.Gov.Cn. http://geneva.china-mission.gov.cn/eng/dbtxwx/202209/t20220911_10765044.htm.
- Global News. (2018). China calls Human Rights Watch ‘full of prejudice’ after criticism of Xinjiang policy. <https://globalnews.ca/video/4439525/china-calls-human-rights-watch-full-of-prejudice-after-criticism-of-xinjiang-policy>.

- Global Times. (2023). Arab League's visit to Xinjiang rejects Western accusations of ethnic genocide, religious persecution. Globaltimes.Cn. <https://www.globaltimes.cn/page/202306/1291964.shtml>.
- Keyes, R. (2004). *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*. St. Martin's Press.
- Kurniawan, A. A., Maulidya, A. D., Sa'ban, K., & Indrawati, I. (2020). The Chinese vs Western Media Framing on Uygur Conflict. *Journal of Islamic World and Politics*, 4(2). <https://doi.org/10.18196/jiwp.4249>.
- Lau, M., & Lew, and L. (2020). China defends its 'vocational training centres' in Xinjiang white paper. SCMP.COM. <https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3101986/china-claims-vocational-training-given-nearly-13-million-people>.
- Maizland, L. (2022). China's Repression of Uyghurs in Xinjiang. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/backgrounder/china-xinjiang-uyghurs-muslims-repression-genocide-human-rights>.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (2017). The agenda-setting function of mass media 1. *The Agenda Setting Journal*, 1(2), 105–116. <https://doi.org/10.1075/asj.1.2.02mcc>.
- Nebehay, S. (2018). U.N. says it has credible reports that China holds million Uighurs in secret camps. Reuters.Com. <https://www.reuters.com/article/us-china-rights-un-idUSKBN1KV1SU>.
- Nebehay, S. (2019). 1.5 million Muslims could be detained in China's Xinjiang: academic. Reuters.Com. <https://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang-rights-idUSKCN1QU2MQ>.
- Reuters Staff. (2018). China has prevented "great tragedy" in Xinjiang, state-run paper says. Reuters.Com. <https://www.reuters.com/article/us-china-rights-un/china-has-prevented-great-tragedy-in-xinjiang-state-run-paper-says-idUSKBN1KY01B>.
- SCIO-PRC. (2019). *Vocational Education and Training in Xinjiang* (p. 11). Foreign Languages Press Co. Ltd.
- SCIO. (2019). *Historical Matters Concerning Xinjiang. White Paper*, July. <http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper>
- SCIO PRC. (2019). [white paper] *The Fight Against Terrorism and Extremism and Human Rights Protection in Xinjiang*. Geneva.China-Mission.Gov.Cn. http://geneva.china-mission.gov.cn/eng/ztjs/aghj12wnew/Whitepaper/202110/t20211014_9587980.htm.
- Sheng, B. H. and Z. (2021). Xinjiang hype illustrates Western media hypocrisy. *Global Times*. <https://www.globaltimes.cn/page/202103/1218895.shtml>.
- Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN KUALITATIF untuk penelitian yang bersifat: eksplorasi, Enterpretif, interaktif dan konstruktif* (S. Suryandri (ed.); ke-3). Alfabeta CV.
- Tanner, M. S., & Bellacqua, J. (2016). China's Response to Terrorism. *Cna*, 11(June), 1–208.
- Thomas Lum, & Weber, M. A. (2022). *China Primer: Uyghurs. 2020–2022*. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10281>.
- Uk.chineseembassy. (2018). *The Financial Times Carries Ambassador Liu Xiaoming's Article:*

Harmony in Xinjiang Is Based on Three Principles. Gb.China-Embassy.Gov.Cn.
<http://gb.china-embassy.gov.cn/>.

van Dijk, J. A. G. . (2009). The Myth of Digital Democracy; Digital Citizenship, the Internet, Society and Participation. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, August, n/a-n/a. <https://doi.org/10.1002/asi.21207>.

Xin, L. (2020). Western media “malicious” to hype prisoner transfers in Xinjiang. *Global Times*. <https://www.globaltimes.cn/content/1195343.shtml>.

YINMENG, L. (2021). China calls for unity in anti-terrorism fight. *Chinadaily.Com.Cn*. <https://global.chinadaily.com.cn/a/202110/07/WS615eea70a310cdd39bc6d594.html>.

Youna Bachtiar, A., Hikmah Perkasa, D., Rizki Sadikun, M., Arjuna Utara No, J., Tomang, T., Jeruk, K., & Barat, J. (2016). Peran Media Dalam Propaganda. *Peran Media Dalam Propaganda Jurnal Komunikologi*, 13, 78.